

ANALISIS PEMBANGUNAN e-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Oleh

Suharlin Sudarmadji

Jurusan Teknik Elektro, Universitas Jenderal Achmad Yani

Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO Box 148 Cimahi

e-mail : suharlin_sudarmadji@yahoo.com

Pembangunan e-Government telah dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. e-Government pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi oleh suatu pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih nyaman, cepat, murah dan transparan. Namun banyak ditemui bahwa kondisi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemerintah ini belum mampu memberikan nilai tambah bagi organisasai. Beberapa kegagalan proyek teknologi informasi di pemerintah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-Government sangat terbatas, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, struktur organisasai pengelolaan e-Government yang belum memadai dan belum tersedianya anggaran operasional yang memadai juga. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka pembangunan e-Government harus dilaksanakan secara terkoordinir, terencana sesuai kebutuhan. Peran pemerintah pusat maupun propinsi menjadi koordinator pelaksanaan e-Government sangat penting karena kunci suksesnya pelaksanaan e-Government adalah tersambungannya kebutuhan masing-masing pihak baik masyarakat, stake holder maupun pemerintah dalam satu kepentingan. Selain sarana dan prasarana jaringan, sumberdaya manusia yang handal maka budaya kerja yang masih tradisional juga perlu dirubah secara sistematis agar mereka terbiasa dan dapat menyesuaikan dengan perubahan.

Kata kunci : e-Government, implementasi, keberhasilan

I. Pendahuluan

E-Government merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga menjadi lebih nyaman, cepat, murah dan transparan.

Untuk implementasi e-Government, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi Nasional pengembangan e-Government yang dituangkan dalam Inpres no.3 tahun 2003.

Menurut Inpres no.3 tahun 2003 :

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktifitas yang berkaitan yaitu :

- (1) *pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik*
- (2) *pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.*

II. Pengertian e-Government

Menurut Heeks (1999) dalam *Electronics Government for Good Governance* (Hasibuan ZA), *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informaasi* vol.1, no.1, Nov. 2002

Definisi : kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informaasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut Bank Dunia (The World Bank Groups) memberikan pengertian :

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government”

Disebutkan pula, sebagaimana halnya e-Commerce yang memungkinkan bisnis bertransaksi dengan pelaku bisnis lainnya dengan lebih efisien (Business to Business – B2B) dan membawa pelanggan lebih dekat pada bisnis (Business to Consumer – B2C), e-Government bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Government to Citizens – G2C), pemerintah dan kalangan bisnis (Government to Business – G2B), serta antar instansi pemerintah (Government to Government – G2G) lebih bersahabat, nyaman, transparan dan murah.

Disamping pengertian diatas, terdapat pula pengertian yang berdasarkan pada tahapan dalam pengembangan aplikasi e-Government. Agarwal membagi pengertian e-Government ke dalam lima tingkatan, dimana semakin

tinggi tingkatannya semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi.

1. Tingkatan paling rendah adalah apa yang disebut dengan e-Government untuk menunjukkan pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada didalamnya. Pada dasarnya e-Government pada tingkat awal ini masih bersifat memberi informasi tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Kondisi e-Government pada tingkatan ini belum dapat digunakan untuk membentuk pemerintahan *Good Government*, sebab informasi yang diberikan kepada masyarakat luas masih bersifat satu arah.

2. Tingkat kedua dari e-Government mulai ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara *online* antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat. Sebagai contoh masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan rekening listrik, tagihan telepon dan lain-lain. Semuanya bisa dilakukan secara *online*. Komunikasi dua arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara *online*.

Apabila e-Government yang berada pada tingkat kedua ini dijalankan dengan baik, maka masalah *Good Government* sudah bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi karena para aparat pemerintah tidak lagi bersinggungan dengan pelanggan secara langsung.

3. Level ketiga dari e-Government memerlukan kerjasama (kolaborasi) secara *online* antar beberapa institusi dan masyarakat. Sampai saat ini di Indonesia belum dapat terwujud, tetapi usaha kearah tingkat ketiga ini sudah mulai diupayakan. Manfaat dari level ketiga ini adalah waktu pemrosesan dokumen menjadi relatif lebih cepat dibandingkan secara manual. Yang akhirnya akan meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan.

Apabila e-Government pada tingkat ketiga ini dapat diimplementasikan di kalangan institusi

pemerintah, ketidak efisienan sudah tidak lagi bisa berkembang.

4.Level keempat dari e-Government sudah semakin kompleks. Disini diperlukan kerjasama antar institusi dan masyarakat dan diperlukan arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam tingkat ini seseorang bisa mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, maka pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk semua institusi pemerintah terkait.

Sebagai contoh seseorang yang pindah alamat , orang tersebut cukup mengganti alamatnya dari suatu data base milik pemerintah dan secara otomatis KTP, SIM dan lain-lain sudah ter-update.

5.Level kelima, pemerintah memberikan informasi yang terpaket sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah dapat memberikan apa yang disebut dengan „*information push*“ yang berorientasi kepada masyarakat, dimana kebutuhan masyarakat telah dapat disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut *Center for Democracy and Technology dan InfoDe*, proses implementasi e-Government terbagi menjadi tiga tahapan yang tidak tergantung satu sama lain atau harus dilakukan secara berurutan , tetapi masing-masing menjelaskan tujuan dari e-Government.

Tahapan tersebut adalah :

1.Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah. Sebagai contoh adalah pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.

2.Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Misalnya pembuatan situs yang interaktif dengan

publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain.

3.Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara *online*. Sebagai contoh pembuatan situs transaksi layanan publik serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

III. Pelaksanaan e-Government di Indonesia.

Ditemukan sejumlah hambatan pada penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi di Indonesia, antara lain :

- Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pada instansi pemerintah yang sangat terbatas (belum siap menerima perubahan kultur ke teknologi informasi komunikasi). Dalam proses implementasi e-Government, masalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai standard kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi jauh lebih sulit dibandingkan dengan dengan masalah teknologinya sendiri. Pada sejumlah kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sekitar 3-5 orang saja, dan umumnya tidak berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika dan Elektro.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang e-Government merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Kenyataannya baru 55 % pemerintah daerah yang menyatakan telah mengimplementasikan e-Government , sedang sisanya belum mempunyai strategi untuk mengimplementasikan e-Government.
- Struktur organisasi pengelolaan e-Government yang belum memadai.

Pada saat ini pengelolaan situs web pemerintah daerah (sebagai embrio pengelola e-Government) masih berbagai unit kerja yang terdapat di pemerintahan daerah. Penunjukan siapa pengelola e-Government di pemerintah daerah memang sangat diperlukan, mengingat sangat kompleksnya implementasi e-Government yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- Belum tersedianya anggaran operasional yang memadai (akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi).

Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum merupakan skala prioritas di dalam pembangunan daerah dan diperlukannya dana yang cukup besar untuk pembangunan e-Government di daerah.

- Kurang adanya perhatian /kepedulian pejabat pemerintah didalam pembangunan dan pengembangan e-Government.

Agar penyelenggaraan e-Government di Indonesia dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berdaya guna, maka perlu dicarikan jalan keluarnya.

IV. Kesimpulan

Pembangunan dan pengembangan e-Government merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta. Untuk mampu mengimplementasikan e-Government di pemerintah terutama di daerah, maka :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus dioptimalkan untuk dapat mengembangkan e-Government
2. Sumberdaya manusia harus ditingkatkan sehingga mempunyai standar kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi
3. Penyediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi komunikasi dan pemanfaatan optimal dari aplikasi yang sudah tersedia.

V. Daftar Pustaka

- [1] Departemen Teknik Elektro – ITB dan The Indonesian ICT Institute, Prosiding Konferensi Nasional e-Indonesia Initiatives 2005, Bandung 3-4 Mei 2005.